



KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN

FASILITASI AKUNTABILITAS SOSIAL DI DESA



Outline

1

- Pengertian dan Tujuan Akuntabilitas Sosial di Desa

2

- Strategi Penerapan Akuntabilitas Sosial di Desa

3

- Penguatan Partisipasi Warga Desa dan Tata Kelola Desa

4

- Pendampingan Organik dan Kaderisasi

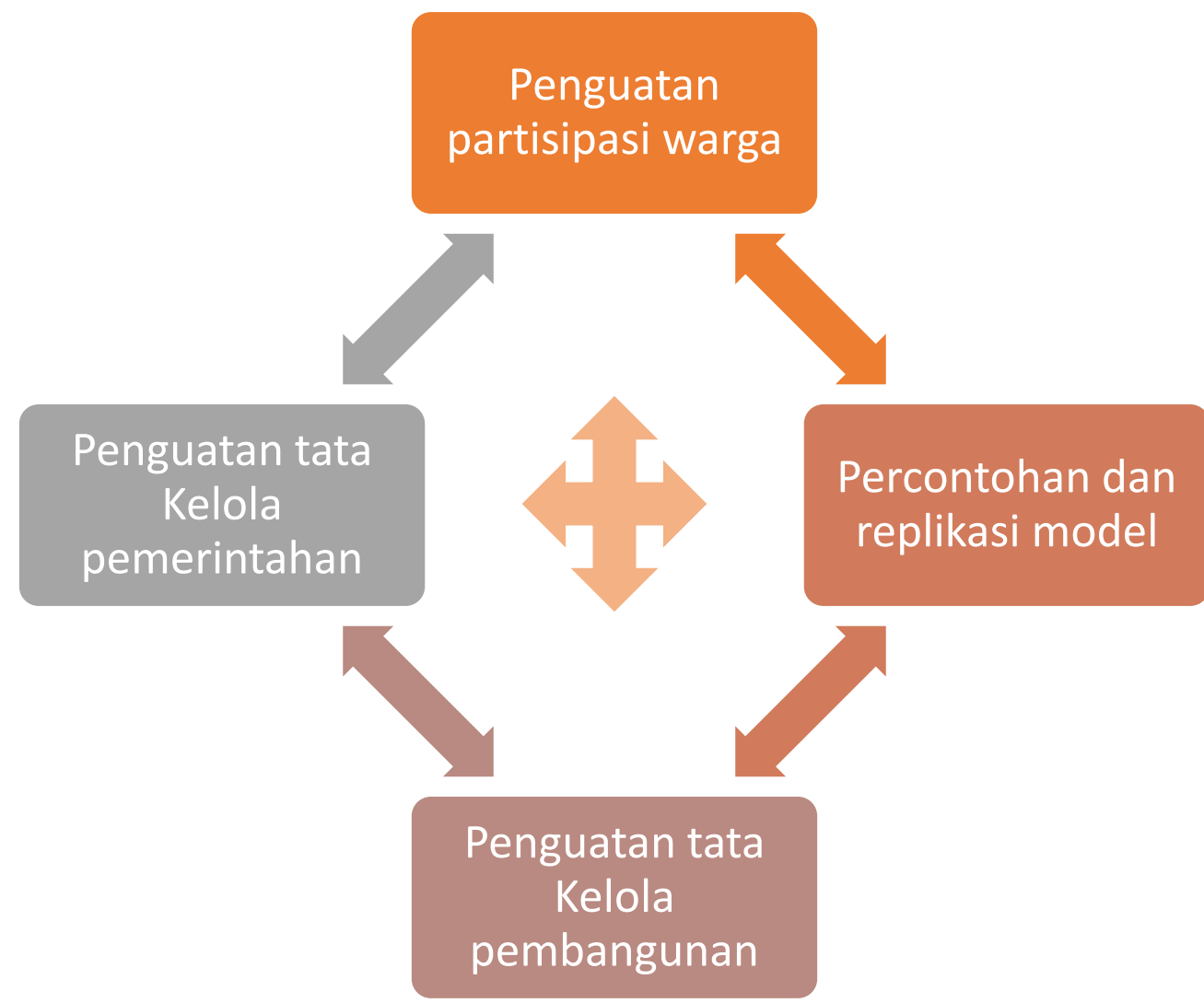
5

- Fasilitasi Akuntabilitas Sosial di Desa (Contoh Praktek)

Proses pertanggungjawaban kepala Desa kepada BPD dan warga Desa perihal penyelenggaraan pembangunan Desa. Seluruh proses pertanggungjawaban ini dimungkinkan **karena adanya dorongan serta keikutsertaan warga Desa yang aktif terlibat** dalam setiap tahap pembangunan Desa.

Proses akuntabilitas sosial di Desa terjadi sebagai konsekuensi dari partisipasi aktif warga Desa dalam memantau dan mengawasi penyelenggaraan Desa.

Strategi Penerapan Akuntabilitas Sosial di Desa



Pendamping Organik dan Kaderisasi Desa

Akuntabilitas sosial di Desa diperlukan adanya serangkaian proses pemberdayaan masyarakat Desa seperti: **penyadaran, literasi, dan pengorganisasian** yang akan melahirkan bukan saja pemimpin Desa yang bermutu, melainkan juga menciptakan kebiasaan baru di Desa

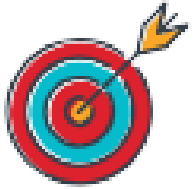
Langkah strategis pembelajaran masyarakat Desa untuk pembentukan akuntabilitas sosial Desa adalah dengan menyadarkan **kelompok marginal dan rentan** untuk bisa bersikap kritis terhadap dunia nyata dalam kehidupan sehari-hari

Sehingga dibutuhkan peran pendamping yang dibentuk dan berasal dari warga/kader desa tersebut atau **Pendamping Organik**

Kaderisasi Desa merupakan tahapan kunci dalam pelaksanaan akuntabilitas sosial pembangunan Desa. Fokus utama kaderisasi Desa adalah melakukan penyadaran atas pentingnya peran dan keterlibatan seluruh warga dalam tata kelola pemerintahan Desa

Penguatan kapasitas kader dan warga

Target



- Kader dan warga yang memiliki kesadaran dan kepentingan atas tata kelola desa dan terlibat dalam proses pembangunan desa
- Menguatnya peran komunitas-komunitas warga mempengaruhi kebijakan strategis desa

Proses



- Pengorganisasian kelompok dalam ruang publik secara formal dan non-formal
- Membiasakan warga terlibat aktif dalam ruang publik, pemanfaatan informasi/data (SID), menyampaikan aspirasi secara formal maupun non formal, seperti media sosial
- Peningkatan kapasitas terstruktur berbasis komunitas (pelatihan berbasis orientasi aksi)

Praktek 1: SEKAR DESA (SEKOLAH ANGGARAN DESA)

APA?

“adalah ruang belajar bagi BPD, Pemerintah Desa dan Warga Desa untuk belajar bersama dalam membaca, menganalisa, serta membedah RPJMDesa, APBDesa, dan RKPDesa sehingga mampu mendorong desa yang transparan, akuntabel dan inklusif. Sekar Desa merupakan program hasil kerja sama antara Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi bersama KOMPAK DFAT melalui Seknas FITRA”

SIAPA ?

SEKAR DESA dapat digunakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Pendamping Desa, BPD, Organisasi Masyarakat Sipil (LSM), dan Kelompok Masyarakat lainnya

BAGAIMANA ?

1. Komunikasi dan koordinasi antara berbagai pihak (Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, BPD, LSM dan lainnya)
2. Menentukan fasilitator Sekar Desa yang berasal dari Organisasi Masyarakat Sipil (FITRA), Kader Desa, Kecamatan dan DPMD Kabupaten/Propinsi
3. Penyelenggaraan Sekar Desa (online ataupun offline) melalui kelas umum (3 hari) dan dilanjutkan kelas intensif (8 Pertemuan)
4. Pendampingan & Praktik Lapangan
5. Monitoring dan Evaluasi

MATERI?

Video dan Modul Sekar Desa dapat diunduh melalui:

<https://drive.google.com/drive/folders/1x3R1H-I3IOv7IBF4XdW37luR8rGj42ie>



Praktek 2: AKADEMI PARADIGTA

APA?

“adalah sistem pendidikan orang dewasa, non-formal, dan terstruktur untuk mengembangkan kepemimpinan perempuan di desa demi memastikan terciptanya Desa yang inklusif, akuntabel, dan responsif gender. Paradigta artinya perempuan yang tegak berdiri. Program ini merupakan hasil kerja sama antara Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi bersama KOMPAK DFAT melalui YAYASAN PEKKA”

SIAPA ?

Akademi Paradigta dijalankan melalui struktur yang dijalankan oleh YAYASAN PEKKA melalui Serikat PEKKA yang tersebar di seluruh Indonesia. Mentor atau fasilitator Sekar Desa adalah Kader PEKKA, Perempuan Setempat yang telah dilatih dan disertifikasi oleh PEKKA

BAGAIMANA ?

1. Komunikasi dan koordinasi antara berbagai pihak (Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dengan Yayasan PEKKA)
2. Menentukan mentor Akademi Pardigta yang berasal dari kader Pekka atau alumni Akademi Pardigta
3. Penyelenggaraan Akademi Paradigta (ada 17 modul yang bisa dilaksanakan secara fleksibel)
4. Pendampingan & Praktik Lapangan
5. Monitoring dan Evaluasi

MATERI?

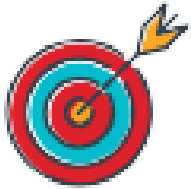
Video Akademi Paradigta dapat diunduh melalui:

<https://drive.google.com/drive/folders/1x3R1H-I3IOv7IBF4XdW37luR8rGj42ie>



Akuntabilitas Sosial berbasis Tata Kelola Pemerintahan Desa Demokratis

Target



- Semakin terbukanya akses warga terhadap informasi dan data seputar hal strategis desa
- Semakin besarnya keterlibatan warga dalam proses perencanaan, verifikasi dan validasi data SID, evaluasi pencapaian SDGs Desa
- Akses yang luas bagi warga, khususnya perempuan dan disabilitas untuk menjadi perangkat pemerintahan desa
- Perbaikan mutu layanan di desa untuk warga, khususnya warga marginal dan rentan

Proses



- Pengorganisasian warga dalam ruang publik non-formal dengan mengembangkan jurnalisme warga dan pendataan desa, termasuk validasi SID
- Penguatan kepemimpinan warga dan membentuk gerakan swadaya dalam pemilihan kepala desa dan BPD yang berintegritas
- Memprakarsai dan mengorganisir warga dalam penyusunan dan pemantauan Maklumat Layanan Desa
- Bersama BPD memprakarsai pembentukan posko aspirasi, posko pengaduan dan membantu memilah aspirasi
- Menggerakkan pengumpulan data, informasi dan masukan warga mengenai kasus layanan dasar dan mengadvokasi layanan di desa (oleh OPD kab/unit layanan)

Praktek 3: POSKO ASPIRASI DAN PENGADUAN BPD

APA?

merupakan wahana atau tempat untuk menampung, mengelola, dan menyalurkan aspirasi, termasuk pengaduan masyarakat desa yang dikelola oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Tujuannya adalah agar aspirasi/keluhan/pengaduan masyarakat desa khususnya kelompok rentan dapat dengan cepat dan tepat tertangani melalui mekanisme pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, akuntabel dan responsif gender.

SIAPA ?

Posko Aspirasi dapat digunakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Pendamping Desa, BPD, Organisasi Masyarakat Sipil (LSM), dan Kelompok Masyarakat lainnya

BAGAIMANA ?

1. Rapat Internal BPD pembentukan Tim Posko Pengaduan bersama masyarakat;
2. Menyiapkan saluran pengaduan, misalnya: Kotak Pengaduan, Form Pengaduan, Hotline Pengaduan, WA khusus pengaduan, dll;
3. Penyelenggaraan Pekan Pengaduan;
4. Mengelola Hasil Pengaduan (Menampung, Mengklasifikasi, Memverifikasi)
5. Tindak Lanjut Hasil Pengaduan
 - Penyelesaian Langsung
 - Dibahas di Musdes (Akomodasi dalam RPJMDesa, RKPDesa, APBDesa)
 - Dijadikan bahan penyusunan Perdes Inovatif Desa
 - Disampaikan ke Supra Desa (karena bukan Kewenangan Desa)



MATERI?

Video Posko Aspirasi dapat diunduh melalui:

<https://drive.google.com/drive/folders/1x3R1H-I3lOv7lBF4XdW37luR8rGj42ie>

[illegible]

Praktek 4: PEWARTA WARGA (JURNALISME WARGA)

APA?

“Jurnalisme warga dapat menjadi kanal demokrasi di luar sistem pemerintahan yang efektif untuk melecut pemerintah Desa bekerja secara lebih akuntabel dan bertanggungjawab”

SIAPA ?

Para pendamping dapat mengembangkan jurnalisme warga secara mandiri (otodidak) ataupun bekerja sama dengan OMS, organisasi media, dan kalangan perguruan tinggi.

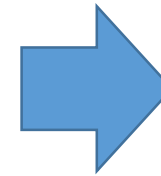
BAGAIMANA ?

1. Komunikasi dan koordinasi antara berbagai pihak (Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, LSM, organisasi media dan lainnya)
2. Menentukan pelatih Jurnalisme Warga yang berasal dari Organisasi Masyarakat Sipil, perguruan tinggi dan organisasi media
3. Penyelenggaraan pelatihan Jurnalisme Warga
4. Pendampingan & Praktik Lapangan
5. Monitoring dan Evaluasi

MATERI?

Jurnalisme Warga menekankan pada pembelajaran sbb:

1. bagaimana merumuskan masalah secara objektif dan naratif (tentang: apa – siapa – mengapa – di mana – bagaimana),
2. bagaimana menyeleksi data dan informasi yang diperlukan,
3. bagaimana membuat dan memanfaatkan gambar foto serta video,
4. bagaimana menyusun tulisan yang terstruktur dan mudah dipahami, dan
5. Bagaimana dan dimana mempublikasikan tulisan



Akuntabilitas Sosial berbasis Tata Kelola Pembangunan yang Berkeadilan Sosial

Target



- Keterbukaan dan perluasan akses terhadap data serta informasi pembangunan termasuk data dan informasi kemajuan pembangunan (SDGs Desa)
- Warga, termasuk kelompok marginal dan rentan terlibat dalam perencanaan, termasuk pendataan desa dan mendapat layanan berdasar data
- Terlaksananya pengawasan masyarakat desa dalam pembangunan

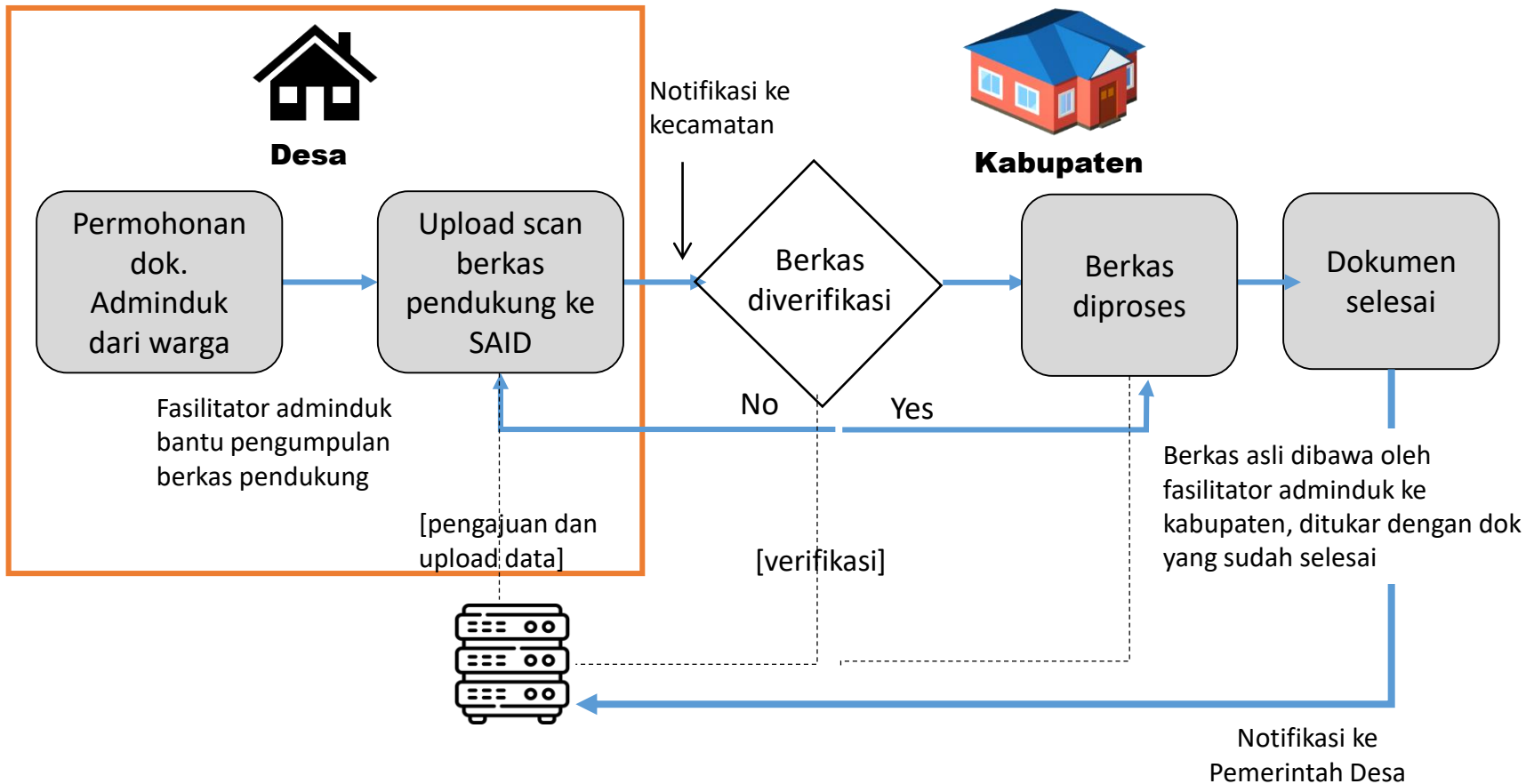
Proses



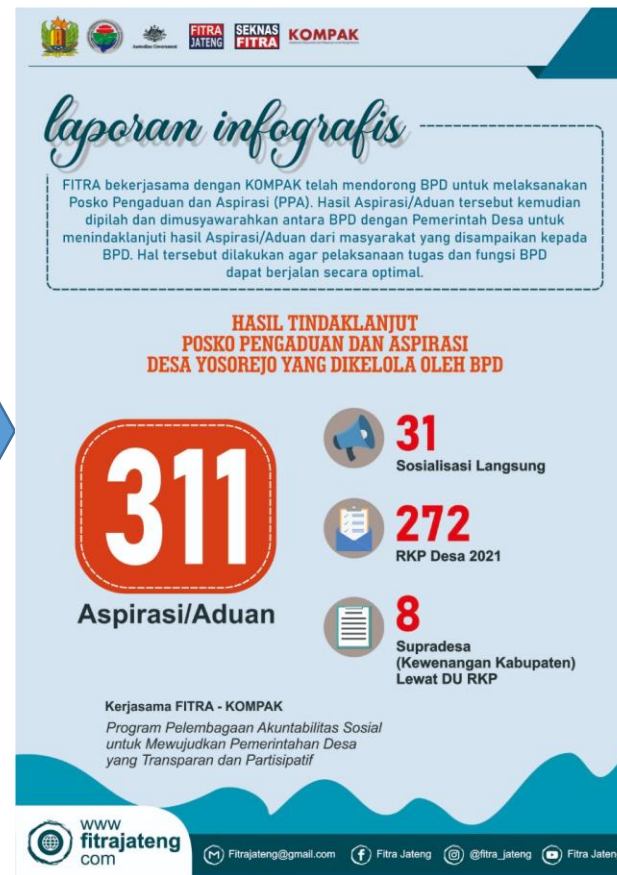
- Mendorong pendataan yang akurat dan analisis kebutuhan program/kegiatan pembangunan (dan layanan) yang sesuai dengan data
- Memastikan keterwakilan waga dalam forum maupun dalam tahapan pembangunan
- Memastikan partisipasi aktif warga memanfaatkan kartu penilaian dalam SID mengenai pencapaian SDGs Desa

Praktek 5: Pemanfaatan Sistem Informasi Desa

Sistem Administrasi Informasi Desa (Contoh Kab Bondowoso)



Praktek 6: Data dan Sistem Informasi Desa



Praktek 7: Pendataan oleh Kader Kampung di Papua

SAIK+

DATA TERPILAH



Pengumpulan data primer melalui **SENSUS RUMAH TANGGA**

Data dikumpulkan & diinput oleh **KADER KAMPUNG** yang **TERLATIH**

Data dapat dikonversi menjadi sistem **TIK & "OPEN SOURCE"** sehingga dapat diadaptasi & **DIKEMBANGKAN SECARA BERKELANJUTAN & MANDIRI** oleh kampung melalui kader kampung



Mengembangkan fitur data yang kontekstual bagi Papua, mencakup **DATA KEPENDUDUKAN**, sosial & ekonomi setiap individu di dalam satu kampung yang **TERPILAH OAP - NON OAP**

Data bisa disajikan dalam bentuk **OFFLINE & ONLINE** (website kampung/kelurahan)

PEMANFAATAN DATA dalam perencanaan/ penganggaran pembangunan Kampung yang dioperasikan oleh Pemerintah Kampung **BERBASIS SUMBER DAYA KAMPUNG**

Kartu Penilaian Warga (Score Card)

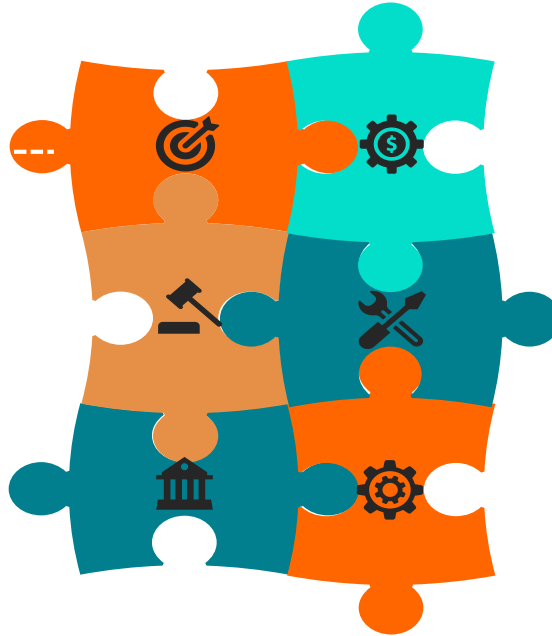
Scorecard (Kartu Penilaian Warga) adalah media bagi warga Desa memberikan umpan balik terhadap kinerja layanan yang ada di Desa dan atau unit layanan oleh supra Desa



Pembelajaran Fasilitasi Akuntabilitas Sosial

01 Konteks Lokal

02 Setiap Model Saling Melengkapi



03 Dibutuhkan Dukungan Yang Memungkinkan (*enabling environment*)

04 Optimalisasi Kelembagaan dan Saluran yang tersedia

Terima kasih